

## PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL BERBASIS MAJELIS TAKLIM DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Agus Riyadi  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Agus.riyadi@walisongo.ac.id

### Abstract

*Majlis taklim is a vehicle for strong interaction and communication between ordinary people with the mualim (teacher), and between fellow members of the assemblies taklim without being limited by place and time. Thus the majlis taklim become an alternative religious education institution for those who do not have enough energy, time, and opportunity to study the religion in formal education. This is what makes the majlis taklim has its own value compared to other religious institutions. Therefore, the development of teaching-based community-based society gives emphasis on process-oriented goals (process goals) where the community in this case is the board and teachers majelis taklim tried to be integrated and developed capacity in an effort to prevent their own problems and problems in the community, comparatively based on the willingness and ability to help oneself (self help) in accordance with democratic principles. The stages used to conduct community development based on majelis taklim through several stages, namely; preliminary study on the picture of majelis taklim, identification of problem and potential of majelis taklim, preparation of alternative action plan, structuring and implementation of action program, and evaluation*

\*\*\*\*

Majelis taklim merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mualim, dan antara sesama anggota jamaah majelis taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan demikian majelis taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan majelis taklim memiliki nilai tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Oleh karena itu pengembangan masyarakat berbasis majelis taklim memberikan penekanan pada tujuan yang berorientasi pada proses (*process goal*) dimana masyarakat yang dalam hal ini adalah para

pengurus dan pengajar majelis taklim dicoba untuk diintegrasikan serta dikembangkan kapasitasnya dalam upaya mencegah masalah mereka sendiri serta masalah di masyarakat, secara komparatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan untuk melakukan pengembangan masyarakat berbasis pada majelis taklim melalui beberapa tahapan, yaitu; studi pendahuluan tentang gambaran majelis taklim, identifikasi masalah dan potensi majelis taklim, penyusunan alternative rencana aksi, penataan dan pelaksanaan program aksi, dan evaluasi.

Kata Kunci: Majelis Taklim, Pengembangan Masyarakat

## A. PENDAHULUAN

Isu pengembangan masyarakat lokal akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengambil peran secara lebih emansipatif dalam proses pembangunan. Sejalan dengan semangat keterbukaan dan penerapan otonomi telah menempatkan kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta sebagai *stakeholders* pembangunan. Kondisi ini telah berimplikasi terhadap semakin terbukanya peluang bagi aktivis-aktivis sosial untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas atau akar rumput melalui skema aksi-aksi pengembangan masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi dan emansipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkungan regional maupun global. Dari sini upaya pengembangan masyarakat lokal seharusnya menjadi bagian integral dan upaya suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, partisipasi, dan emansipasi para warganya dalam proses pembangunan.<sup>1</sup>

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (pro-pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problem kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat.

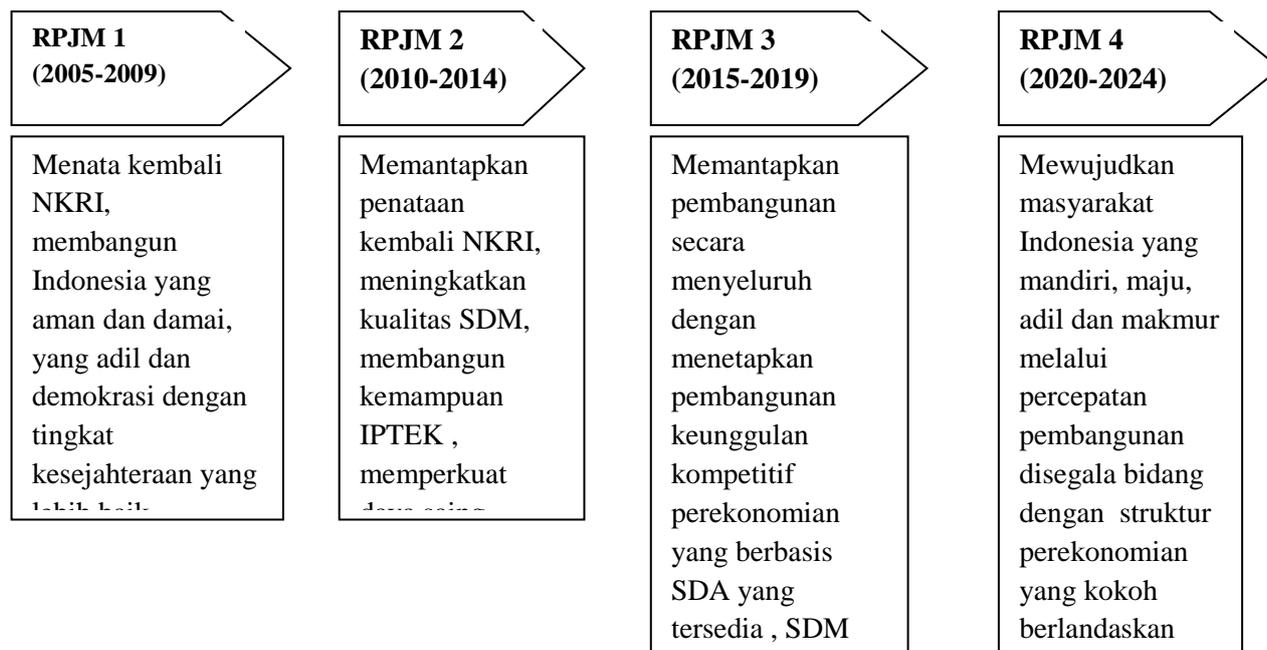
Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pengembangan masyarakat lokal menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, bersifat *bottom-up* dan lokalitas. Gagasan alternatif seperti ini didasari oleh sebuah cita-cita untuk mengembangkan, merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang lebih menekankan prinsip keadilan maupun program implemtatif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu

---

<sup>1</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*, (Jakarta : Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm. v

dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal bukan memaksakan model pembangunan dari luar atau atas.<sup>2</sup>

Kedudukan pengembangan masyarakat lokal telah tertulis dalam RPJPN 2005 - 2025, yang tertuang ke dalam beberapa RPJM, yakni terletak pada RPJM tahap terakhir tahun 2020 - 2024.



Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pengembangan masyarakat lokal harus menitikberatkan pada komunitas sebagai suatu kesatuan yang mengutamakan prakarsa dan sumber daya setempat.<sup>3</sup> Salah satunya adalah keberadaan majelis taklim<sup>4</sup> yang dalam masyarakat benar-benar menjadi wadah

<sup>2</sup> M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 132.

<sup>3</sup> Salah satu strategi untuk menciptakan kondisi di atas adalah dengan melakukan pengembangan masyarakat, yang memberi tekanan pada aktivitas multi sektoral, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), partisipasi lokal dan mobilisasi. Hal ini sejalan dengan permasalahan pembangunan yang bersifat multi dimensi atau sangat kompleks, yang mencakup budaya, politik, sosial, teknikal, dan dimensi lainnya. Dengan kata lain pengembangan masyarakat berupaya memadukan berbagai sektor pembangunan yang perlu dikembangkan, dengan melihat berbagai dimensi baik kekuatan maupun kelemahan lokal, seperti sosial, budaya, politik, kelembagaan, potensi dan lainnya, dengan menumbuhkan kekuatan masyarakat melalui partisipasi lokal, atau dengan kata lain masyarakat menentukan apa yang diinginkan atau dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lokal.

<sup>4</sup> Secara literal majelis taklim berarti 'tempat pembelajaran' yang merupakan wadah dimana suatu kelompok masyarakat (laki-laki ataupun perempuan) bertemu untuk belajar dan

kegiatan bagi kaum perempuan maupun laki-laki. Keberadaan majelis taklim pada umumnya telah mendapat tempat dalam masyarakat secara meluas sehingga fungsi dan perannya dari waktu ke waktu cenderung bertambah dan berkembang dalam berbagai bidang. Fungsi dan perannya tidak lagi sebatas sebagai wadah kaum perempuan maupun laki-laki dalam mengkaji dan mendalami ajaran agama mereka (agama Islam), tetapi juga menjadi ruang bagi mereka untuk berkiprah dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan dan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Majelis taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mualim, dan antara sesama anggota jamaah majelis taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan demikian majelis taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama dijalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan majelis taklim memiliki nilai tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Sekurangnya terdapat empat fungsi penting majelis taklim, yaitu: (1) sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama di masyarakat dan bertujuan untuk

---

mendalami ajaran agama. Majelis taklim hidup bersifat nonformal dan tumbuh semarak di seluruh pelosok tanah air baik melalui organisasi-organisasi keagamaan maupun organisasi-organisasi masyarakat. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang bersifat non-formal, terbuka bagi semua orang tanpa memperhatikan gender, usia, status, maupun kedudukan di masyarakat (Weix 1999). Majelis taklim juga didefinisikan sebagai "lembaga atau organisasi sebagai wadah pengajian" dan "sidang pengajian" atau "tempat pengajian" (KBBI, 2005:699). Sekarang majlis taklim telah berhasil mendirikan organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang telah memayungi berbagai lembaga pengajian kaum perempuan yang ada. Bahkan, hampir semua ormas Islam dan partai politik yang berbasis massa Islam juga ikut-ikutan membentuk organisasi yang membawahi majelis taklim karena diharapkan dapat menggalang kekuatan dan massa pemilih, selain sebagai tempat pembinaan keimanan dan agama para anggotanya. Akhirnya berbagai corak dan bentuk majelis taklim telah berdiri di semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) sampai dengan tingkat regional dan nasional. Lihat dalam bukunya Muhsin MK, *Manajemen Majelis Taklim*, Pustaka Internusa, Jakarta 2009, hlm. 5

<sup>5</sup> Kehadiran Majelis taklim dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial yang semakin menguat hadir di tengah-tengah masyarakat. Majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Majelis taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Tempat yang digunakannya pun bisa dilakukan dirumah, masjid, mushalla, gedung, aula, halaman, dan sebagainya. Selain itu majelis taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non-formal. Fleksibilitas majelis taklim inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling dekat dengan umat (masyarakat).

membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, (2) sebagai wahana wisata rohani, (3) sebagai wadah silaturahmi, dan (4) sebagai medium penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan ummat dan bangsa.<sup>6</sup>

Berkarangkat dari dinamika majelis taklim dalam merespon kebutuhan masyarakat sekitarnya yang sangat jelas, dengan demikian, makalah ini akan membahas tentang pengembangan masyarakat lokal, majelis taklim sejarah dan konsep, serta tahapan pengembangan masyarakat lokal melalui majelis taklim.

## B. KONSEP DASAR PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL

### 1. Pengertian Pengembangan Masyarakat Lokal

Dasar filosofis pengembangan masyarakat lokal adalah *help people to the help himself* (membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri). Dengan demikian, paradigma masyarakat yang ingin dibangun adalah masyarakat yang senantiasa berada dalam proses menjadi, *becoming being*, bukan *being in statis state*.<sup>7</sup> Dengan kata lain, visi pengembangan masyarakat sebagai terjemahan dari dasar filosofisnya adalah membantu proses pemberdayaan masyarakat agar mereka menjadi komunitas yang mandiri. Pengembangan masyarakat secara substansial merupakan proses restrukturisasi masyarakat yang dilakukan dengan pola swadaya-partisipatif dalam mengelola dan mengorganisasikan kehidupan sosial-ekonomi, sehingga masyarakat memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhannya dibanding waktu sebelumnya.<sup>8</sup>

Pengembangan masyarakat lokal, dengan demikian dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah *"the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions."* Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan

---

<sup>6</sup> Lihat laporan tahun 2007 WEMC RAHIMA *Strategi Perempuan dan Peran Majelis taklim dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di Desa Mulyasari Kabupaten Cianjur* belum dipublikasikan, hlm. 4

<sup>7</sup> Rr. Suhartini A. Halim, dkk., *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 3.

<sup>8</sup> Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*, (Melbourne: Addison Wesley Longman, 1997), hlm. 2.

orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.<sup>9</sup>

Pengembangan masyarakat lokal dalam konteks ini berbeda dengan kerja masyarakat (*community work*). Sebab dalam pengembangan masyarakat terdapat gagasan transformasi atau perubahan sosial. Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya memperkuat interaksi sosial, menciptakan semangat kebersamaan dan solidaritas kelompok sehingga terbangun kohesivitas sosial yang produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pengembangan masyarakat lokal adalah tahapan awal menuju proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat (*community development*) digunakan sebagai pendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi, sedangkan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan pendekatan dalam konteks teori ketergantungan (*dependency theory*).

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat dua kecenderungan. *Pertama*, proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. *Kedua*, melakukan konsientisasi (*conscientization*) yakni suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi maupun sosial. Seseorang dikatakan sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri.

Oleh karenanya kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat

---

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 12.

(*empowering society*). Hal ini karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya hanya difokuskan pada pencapaian target perubahan yang bersifat kuantitatif yang diindikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Perubahan kuantitatif ini menjadi modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terberdayakannya masyarakat, baik dalam cara berpikir, bersikap, dan dalam pengambilan keputusan. Jika masyarakat sudah mengalami perubahan kualitatif serta sudah mampu berorientasi jangka panjang, makro dan substansial berarti mereka sudah berada dalam tahapan terberdayakan.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer dari penelitiannya, yaitu: (1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif; (2) Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan (3) Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok. Grand Theories dari konsep *empowerment* (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai, ada perbedaan kelas, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan.<sup>10</sup>

Dari beberapa konsep di atas setidaknya dapat dicatat tiga hal yang membentuk substansi pengembangan masyarakat. *Pertama*, kegiatan belajar dan pencerahan, kegiatan penyadaran, dan kegiatan memperbesar pengaruh masyarakat terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka sebagai proses. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan, peningkatan kualitas hidup, harkat dan martabat, serta pembebasan dari kemiskinan, keterbelakangan, dan diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan. *Ketiga*, masyarakat tidak beruntung atau tertindas sebagai subyek pengembangan.

---

<sup>10</sup> Onny S. Prijono dan Pranarka A.M.W. (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), hlm. 54-55.

Konsep pengembangan masyarakat dengan ketiga komponennya tersebut menyarankan bahwa sebagai gerakan sosial, pengembangan masyarakat tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Lebih dari itu, pengembangan masyarakat dimaksudkan terutama sebagai usaha untuk membangun kemandirian masyarakat. Kemandirian dalam konteks ini mempunyai makna bahwa masyarakat mampu menformulasikan sendiri kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas penyelenggaraan aktivitas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri.<sup>11</sup> Singkatnya, orientasi pengembangan masyarakat adalah membangun kemandirian masyarakat agar mereka terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan aneka bentuk diskriminasi sosial.

Konsep pengembangan masyarakat dengan ketiga komponen tersebut, menurut A. Halim, dilandasi oleh lima asumsi dasar yaitu: *Pertama*, pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat harus dilihat sebagai peletakan tatanan sosial dimana warga masyarakat dapat melaksanakan usahanya secara adil dan terbuka sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang mereka miliki, sehingga kebutuhan (material dan spiritual) mereka dapat dipenuhi. Karena itu, pengembangan masyarakat tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pemahaman struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengembangan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan sesuatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia. *Kedua*, pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. *Ketiga*, pengembangan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan mereka. Karena itu, pengembangan masyarakat sesungguhnya merupakan suatu proses kolektif dimana masyarakat secara

---

<sup>11</sup> Harry Hukmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2001), hlm. 85.

aktif mengarahkan perubahan sosialnya menuju terpenuhinya kebutuhan bersama. *Keempat*, pengembangan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pengembangan masyarakat, terutama tahapan perumusan kebutuhan yang harus dipenuhi. Asumsi-nya, masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. *Kelima*, pengembangan masyarakat pada akhirnya bermuara pada pemberdayaan masyarakat (Halim, 2005: 6-7).<sup>12</sup>

Dari lima prinsip dasar pengembangan masyarakat di atas, lahirlah hak, nilai, dan keyakinan dalam masyarakat yang harus dihormati, yaitu: *Pertama*, hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. *Kedua*, hak masyarakat untuk berusaha menciptakan lingkungan yang diinginkannya dan menolak suatu lingkungan yang dipaksa-kannya dari luar. *Ketiga*, masyarakat harus diyakini mampu bekerjasama secara rasional dalam bertindak untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnya, serta bertindak dalam mencapai tujuan secara bersama.<sup>13</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat (*community development*) berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) atau pendekatan pemenuhan kebutuhan (*human needs approach*) karena mempunyai orientasi hanya pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karena itu, pengertian kesejahteraan itu sendiri kemudian semakin berkembang bukan hanya pada aspek kesejahteraan ekonomi, melainkan juga pada kesejahteraan sosial-politik. Konsep kemiskinan (*poverty*) yang seringkali melekat dengan isu kelompok masyarakat yang kurang/tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kemudian juga berkembang bukan hanya dalam arti kemiskinan ekonomi melainkan juga kemiskinan sosial-politik. Dengan demikian, upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan juga mencakup pada

---

<sup>12</sup> Rr. Suhartini A. Halim, dkk., *Model-Model.....*, hlm. 6-7

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

pemenuhan kebutuhan dalam arti luas (ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan).

Berdasarkan kajian konsep dasar pengembangan masyarakat yang dilanjutkan dengan mengkonstruksi konsep sebagai bagian dari upaya membangun paradigma baru model, maka pengembangan masyarakat harus mengikuti beberapa prinsip dasar, yaitu: *Pertama*, berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat luas. Pengembangan masyarakat tidak dilaksanakan sekedar merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja, tetapi direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan, ketidakadilan, dan kesewenangan-wenangan tidak lagi hidup di tengah-tengah mereka. *Kedua*, pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan sosial kehidupan sosial yang lebih baik. Pengembangan masyarakat merupakan proses perencanaan perubahan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sasaran utama pengembangan masyarakat lebih pada *setting* sosial kehidupan masyarakat daripada individu-individu. Landasan berpikir para ahli dalam melihat problem yang dihadapi masyarakat adalah sebuah permasalahan sosial yang oleh karena itu pemecahannya mesti dilaksanakan dalam skala kehidupan sosial.

Di samping kedua prinsip dasar tersebut ada beberapa prinsip lain yang harus terpenuhi dalam pengembangan masyarakat, antara lain prinsip kebutuhan artinya program pengembangan masyarakat harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan di sini tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan fisik material namun juga non material. Oleh karena itu program pengembangan masyarakat harus disusun bersama, baru kemudian dirumuskan pula metode materi dan medianya. Dengan demikian seseorang tidak lagi terasing dengan masyarakat sasaran. Konsep pengembangan masyarakat seperti inilah yang ditawarkan sebagai jawaban dan tuntunan kontekstualisasi pengembangan masyarakat.

Prinsip keterpaduan mencerminkan adanya upaya untuk memadukan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Dalam konteks inilah pengembangan masyarakat itu bukan monopoli sekelompok orang yang

ahli atau organisasi, melainkan lebih luas dari itu yakni siapapun yang mempunyai komitmen *community development* yang berpijak pada universalitas nilai-nilai sosial adalah bagian dari seorang yang terjun dalam pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat itu bersifat lintas budaya dan lintas sektoral. Untuk itulah *intergrated or holistic strategy* merupakan pilihan yang tepat dalam proses pengembangan masyarakat.

Dalam pengembangan masyarakat ada sejumlah prinsip umum dan prinsip khusus yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang melakukan kerja pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip umum pengembangan masyarakat dimaksud adalah: *Pertama, human dignity* yakni keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai kehormatan diri, harga diri, mempunyai rasa ingin dimuliakan dan dihargai. *Kedua, self-determination* yaitu setiap orang yang mengalami masalah mempunyai hak penuh untuk menentukan sendiri kebutuhannya dan bagaimana cara mengatasinya. *Ketiga, equal opportunity* yakni keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, yang hanya dibatasi oleh kemampuan masing-masing. *Keempat, individualization* yakni tidak menyamaratakan satu masyarakat dengan lainnya, karena suatu masyarakat atau kelompok orang dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang lainnya. *Kelima, participation* yakni keharusan peran serta seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat dalam suatu kerjasama. *Keenam, transparansi dan akuntabilitas* yakni pengembangan masyarakat membutuhkan sejumlah dana, dan karenanya keterbukaan dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting maknanya. *Ketujuh, social responsibility* yakni hak-hak seseorang untuk dihormati dan dihargai, hak menentukan nasib sendiri, dan kesempatan yang sama. *Kedelapan, self-reliance* yakni pentingnya mem-bangun kepercayaan diri dari klien.<sup>14</sup>

Adapun prinsip-prinsip khusus pengembangan masyarakat adalah: *Pertama*, pengembangan masyarakat didasarkan atas kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. *Kedua*, bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan dan para relawan. *Ketiga*, menguta-makan usaha-

---

<sup>14</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 29

usaha yang bersifat pencegahan. *Keempat*, mem-fasilitasi dan membangun kepercayaan pihak-pihak yang ter-libat dalam pengembangan masyarakat.<sup>15</sup>

Pengembangan masyarakat sebagai tahapan awal menuju proses pemberdayaan masyarakat, menurut Drijver dan Sajise memiliki lima macam prinsip utama, yaitu: *Pertama*, pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan *stakeholder* sepakat pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. *Kedua*, partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. *Ketiga*, konsep keberlanjutan (*sustainability*) yaitu merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga pro-gram pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. *Keempat*, memiliki keterpaduan atau kohesivitas kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. *Kelima*, keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan.<sup>16</sup>

Prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat (*community development*) di atas dalam aplikasi pelaksanaan program di lapangan akan sangat variatif antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Tidak ada suatu rumusan yang baku tentang bagaimana cara mengaplikasikan prinsip-prinsip di atas dalam suatu program pengembangan masyarakat. Sebab dalam pengembangan masyarakat, akan selalu mengupayakan berbagai cara untuk menghubungkan antara teori dan praktek, prinsip dan aplikasinya, kerangka makro dengan mikro, isu global dengan isu lokal, keterkaitan antara semua aspek masyarakat, keterkaitan antara persoalan individu dengan kelompok, strategi dan hal teknis, tujuan jangka pendek/ menengah dengan visi ideal, dsb. Maka dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat di atas tidak bisa kaku, normatif dan tekstual, melainkan harus kontekstual dan adaptif.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>16</sup> Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 17.

## C. MAJELIS TAKLIM DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KONSEP

### 1. Sejarah dan Konsep Majelis Taklim

Keberadaan majelis taklim meski sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, namun secara akademik belum banyak referensi yang mengulas secara sosio-historis lengkap dan mendetail. Ulasan mengenai majelis taklim bisa ditemui misalnya dalam buku “Pedoman Majelis Taklim” atau “Pola Pembinaan Majelis Taklim di DKI Jakarta” yang diterbitkan Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) DKI Jakarta yang disusun pada kebutuhan praktis KODI sendiri dalam membina majelis taklim-majelis taklim.<sup>17</sup>

Jika sejarah majelis taklim ditarik dari sejarah Islam, maka ini bisa dikaitkan dengan proses dakwah Nabi Muhammad Saw ketika menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain dan dari satu tempat ke tempat lain pada periode Makkah. Sedangkan di era Madinah, Islam mulai diajarkan secara terbuka dan diselenggarakan di masjid-masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, baik di era Mekkah ataupun Madinah adalah cikal bakal berkembangnya majelis taklim yang kita kenal saat ini.<sup>18</sup> Rasulullah sendiri juga menyelenggarakan sistem taklim secara periodik di rumah sahabat Arqam di Mekah dimana pesertanya tidak dibatasi oleh usia, lapisan sosial, ataupun ras. Dikalangan anak-anak pada zaman itu juga dikembangkan kelompok pengajian khusus yang disebut *al-kuttab* yang mengajarkan baca Al Qur’an.<sup>19</sup>

Di awal masuknya Islam ke Indonesia, majelis taklim merupakan sarana yang paling efektif untuk memperkenalkan sekaligus menyiarkan ajaran-ajaran Islam ke masyarakat sekitar. Dengan berbagai kreasi dan metode, majelis taklim menjadi ajang berkumpulnya orang-orang yang berminat mendalami agama Islam dan sarana berkomunikasi antar sesama umat. Bahkan, dari majelis taklimlah kemudian muncul metode pengajaran yang lebih teratur, terencana

---

<sup>17</sup> Lisma Dyawati Fuaida, *Pengamalan Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Dhu’afa*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008), hlm. 80

<sup>18</sup> [http://penamasdramaga.blogspot.com/2010/09/majlis-taklim\\_24.html](http://penamasdramaga.blogspot.com/2010/09/majlis-taklim_24.html). Diakses pada tanggal 22 April 2017

<sup>19</sup> Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Ed. Revisi., Cet. ; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 79.

dan berkesinambungan, seperti pondok pesantren dan madrasah.<sup>20</sup> KH. Abdullah Syafi'ie (1910-1985) adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah majelis taklim. Beliau mengembangkan pengajian di masjid-masjid Al-Barqah yang beliau sebut dengan majelis taklim, baik untuk bapak-bapak maupun yang dikhususkan untuk ibu-ibu. Akhirnya istilah majelis taklim menjadi *trade mark* dari pengajian KH. Abdullah Syafi'ie. Sebelum itu orang kalau mau menghadiri pengajian tidak pernah menyebutnya pergi ke majelis taklim, tetapi lebih suka menyebutnya mau pergi ke pengajian. Penamaan majelis taklim akhirnya melahirkan identitas tersendiri yang membedakan dengan pengajian umum biasa, yaitu sifatnya yang tetap dan berkesinambungan. Akhirnya terbukti bahwa kegiatan yang bersifat majelis taklim itu menjadi kebutuhan masyarakat Islam, baik di kota-kota sibuk maupun di desa-desa yang terpencil.<sup>21</sup>

Eksistensi majelis taklim cukup kuat dengan tetap memelihara pola dan tradisi yang baik sehingga mampu bertahan di tengah kompetisi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat formal. Bedanya, kalau dulu majelis taklim hanya sebatas tempat pengajian yang dikelola secara individual oleh seorang Kyai yang merangkap sebagai pengajar sekaligus, maka perkembangan kemudian majelis taklim telah menjelma menjadi lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pengajaran atau pengajian agama Islam dan dikelola dengan cukup baik, oleh individu, kelompok perorangan maupun lembaga (organisasi).

Keberadaan Majelis taklim ini pun secara formal telah diakui pemerintah. Pemerintah secara khusus telah memberikan payung hukum kepada Majelis taklim ini sebagai pendidikan alternatif yang diakui Negara. Hal ini diantaranya diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 26 ayat 4 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa: "Satuan

---

<sup>20</sup> penamasdramaga. loc. cit.,

<sup>21</sup> <http://showbizdunia.blogspot.com/2011/10/sejarah-asal-usul-namamajlis-talim.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2017. Dalam sejarah lain apabila majelis taklim ini dilihat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia, maka majelis taklim ada sejak dimulainya para walisongo menyebarkan Islam di Indonesia. Mereka menggunakan majelis taklim sebagai tempat untuk menyampaikan dakwahnya. Lihat Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta *"Pola Pembinaan Majelis Taklim di DKI Jakarta"*, (Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta, 1986), hlm. 7.

pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.” Berdasarkan UU tersebut majelis taklim menjadi salah satu lembaga pendidikan non formal yang berada di bawah binaan Departemen Agama.<sup>22</sup> Departemen Agama juga membawahi Badan Kontak Majelis taklim (BKMT), yang telah menjadi wadah induk bagi sebagian besar Majelis taklim di Seluruh Indonesia.<sup>23</sup> Majelis taklim diatur pula pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Hanya saja pengaturan di dalam PP 55/2007 tersebut memberi batasan bahwa peran Majelis taklim adalah hanya dalam konteks pendidikan penguatan keimanan dan ketakwaan (ibadah mahdzah), bukan pendidikan yang sifatnya lebih luas tidak semata keimanan tapi hubungan antar manusia (ibadah ghairmahdzah).<sup>24</sup>

Majelis taklim yang hidup dan berkembang di Indonesia perlu diakui sangat beragam. Setidaknya pernah ada yang mengkategorisasi Majelis taklim ditinjau dari metode pengajiannya sebagai berikut:

1. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan ceramah, metode ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :
  - a. Ceramah umum, pengajar bertindak aktif dengan memberikan pelajaran, sedangkan peserta pasif yaitu hanya mendengarkan atau menerima materi

---

<sup>22</sup> Kementerian agama sebagai sebuah lembaga yang mengurus persoalan keagamaan di Indonesia mempunyai berbagai bagian di bawahnya, diantaranya terdapat Direktorat Pendidikan Agama Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid. Lembaga ini mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama di bidang Pendidikan Agama pada masyarakat dan pemberdayaan masjid. Dengan ungkapan singkat, direktorat ini membantu Ditjen Bagais dalam menangani pendidikan jalur luar sekolah (*outschool education*). Lihat laporan tahun 2007 WEMC RAHIMA *Strategi Perempuan dan Peran Majelis taklim dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di Desa Mulyasari Kabupaten Cianjur* belum dipublikasikan, hlm.5

<sup>23</sup> Lembaga ini diinisiasi oleh Ibu Hj. Tuti Alawiyah pada 1 Januari 1981 yang pada awalnya terdiri dari 732 orang pengurus majelis taklim.

<sup>24</sup> Pasal 21 (ayat 1): Pendidikan Diniyah Non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian, kitab, majelis taklim, pendidikan al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pasal 23 (1) menyebut "Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta". Pasal 23 (2); "Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al Quran dan Hadiz sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia". Pasal 23 (3); Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.

- yang disampaikan atau diceramahkan atau yang biasa kita sebut dengan pengajian bandung kuping.
- b. Ceramah terbatas, biasanya terdapat kesempatan untuk tanya-jawab. Jadi pengajar maupun peserta sama aktifnya.
2. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode *halaqah*. Biasanya dalam hal ini pengajar memberikan pengajaran melalui pegangan kitab tertentu. Peserta mendengarkan sambil menyimak kitab yang sama atau melihat papan tulis dimana pengajar menuliskan apa-apa yang hendak diterangkan.
  3. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode muzakarah. Metode ini dilaksanakan dengan cara menukar pendapat atau diskusi mengenai suatu masalah yang disepakati untuk dibahas.
  4. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode campuran. Artinya saat Majelis taklim menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau pengajian, materi yang disampaikan tidak dengan satu macam metode saja, melainkan dengan metode secara berselang-seling.

Sementara ditinjau dari tipe kepengurusannya, majelis taklim dapat dibedakan menjadi : (1) Pengurus yang sendirian. Ia pemilik majelis taklim, pengurus dan juga sebagai guru tetap; (2) Pengurus bersifat pribadi, dengan dibantu oleh keluarga atau murid. Ia pemilik, pengurus juga sebagai guru; (3) Pengurus berstruktur organisasi dengan pembagian tugas untuk masa kepengurusan dua sampai tiga tahun yang dipilih oleh jama'ah; (4) Pengurus berstruktur organisasi yang ditentukan oleh ketua dan adanya pembagian tugas antara pengurus. Ketua biasanya lebih dominan di majelis taklim itu dan sekaligus merangkap menjadi guru; dan (5) Pengurus berstruktur dan pembagian tugas dengan periode atau tanpa periode kepengurusan dimana kepengurusan dibentuk dengan surat keputusan (SK) kantor bersangkutan.<sup>25</sup>

Secara etimologis (arti kata), kata majlis taklim berasal dari bahasa Arab, yakni *majelis* dan *taklim*. Kata 'majelis' berasal dari kata *jalasa, yajlisu*, yang

---

<sup>25</sup><http://uchinfamiliar.blogspot.com/2009/02/macam-macam-majelis-taklim.html>, diunduh pada tanggal, 22 April 2017.

artinya *duduk* atau *rapat*.<sup>26</sup> Adapun arti lainnya jika dikaitkan dengan kata berbeda seperti *tempat duduk*, *tempat sidang*, *dewan*. Selanjutnya, kata taklim dari kata '*alima*, *ya'lamu*, *ilman*, yang artinya *mengetahui sesuatu*, *ilmu*, *ilmu pengetahuan*. Arti kata taklim adalah *hal mengajar*, melatih, berasal dari kata '*alama*, '*allaman* yang artinya mengecap, memberi tanda, dan *ta'alam* berarti *terdidik*, *belajar*. Dengan demikian arti majelis taklim adalah tempat mengajar, tempat mendidik, tempat melatih, atau tempat belajar, tempat berlatih dan tempat menuntut ilmu.

Secara terminologis, majelis taklim mengandung beberapa pengertian yang berbeda. Effendy Zarkasyi dalam Muhsin menyatakan, "Majelis taklim bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama."<sup>27</sup> Kemudian dalam musyawarah Majelis Taklim se-DKI pada Juli 1980 dirumuskan definisi majelis taklim, yaitu lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur serta diikuti peserta jamaah yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antar manusia dan Allah Swt, dan antara manusia dan sesama manusia dan dengan lingkungan dalam rangka membina pribadi dan masyarakat bertakwa kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

Sesuai dengan realitas dalam masyarakat maka majelis taklim bisa juga diartikan sarana dakwah pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama. Sedangkan yang dimaksud lembaga pendidikan Islam itu sendiri adalah wadah atau sarana yang mengarahkan, membimbing, dan meningkatkan pendidikan peserta didik melalui sistem pendidikan yang bernuansa Islam yang mengarah kepada manusia berilmu serta berakhlak dan berkepribadian yang beriman dan bertaqwa.<sup>29</sup> Dari beberapa definisi majelis taklim di atas maka dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan

---

<sup>26</sup> Muhsin MK, *Manajemen Majelis Taklim*, (Jakarta : Pustaka Internusa, 2009), hlm. 7.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Nurleni Syahrudin, <http://nurlenisyah.blogspot.com/2010/05/majelistaklim- sebagai lembaga.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2017.

belajar-mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan sebagai wadah melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya.

## 2. Fungsi dan Peran Majelis Taklim

Sebagaimana dibatasinya majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dalam masyarakat Islam maka majelis taklim mempunyai fungsi dan peranan tidak hanya sebagai alat dan sekaligus media pembinaan kesadaran beragama,<sup>30</sup> namun juga mempunyai fungsi dan peran sebagai:

- 1) Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya yang santai.
- 3) Sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi missal yang dapat menghidupsuburkan dakwah dan ukhuwah islamiyah
- 4) Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan umara dengan umat.
- 5) Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya.<sup>31</sup>

Selain fungsi dan peran di atas, majelis taklim juga berfungsi sebagai mesin politik. Hal itu dapat dilihat pada masa Orde Baru pada masa presiden Suharto, keberadaan majelis taklim relatif dikontrol untuk mendukung kepentingan politik. Sementara itu, dengan berubahnya situasi politik paska Orde Baru, majelis taklim masih tetap digunakan untuk kepentingannya politik namun tidak didominasi oleh satu kelompok tertentu melainkan oleh berbagai pihak di tingkat elit politik baru dalam konteks kondisi politik dan masyarakat

---

<sup>30</sup> Usaha pembinaan kesadaran beragama melalui majelis taklim ini, ditinjau dari pendekatannya, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Propaganda, yaitu yang lebih menitikberatkan kepada pembentukan opini publik, agar mereka mau bersikap dan berbuat sesuai dengan pesan-pesan moral Islam, 2) Indoktrinasi, yaitu penanaman ajaran dengan konsepsi yang telah disusun secara tegas dan bulat oleh pihak pengajar untuk disampaikan kepada masyarakat, melalui ceramah, kursus, *training centre* dan sebagainya, 3) Internalisasi, yaitu penanaman nilai-nilai Islam yang diharapkan dapat menumbuh-kembangkan cipta, rasa dan karsa dalam tubuh jama'ah. Lihat <http://showbizzdunia.blogspot.com/2011/10/sejarah-asal-usul-namamajlis-talim.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2017.

<sup>31</sup> Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta *"Pola Pembinaan Majelis Taklim di DKI Jakarta"*, (Jakrta: Pemerintah DKI Jakarta, 1990), hlm. 8.

yang berbeda. Paska Orde Baru, majelis taklim lebih memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitasnya. Di tengah kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dianggap tidak membaik, masyarakat mencari media lain yang dianggap dapat membawa ketenangan batin. Majelis taklim semakin mendapat tempat.

Majelis taklim yang bersifat terbuka dengan jamaah yang terukur dan militan, dianggap sebagai wadah yang sangat strategis pada kondisi menghadapi pemilihan umum di Indonesia sejak Orde Baru hingga paska Orde Baru. Majelis taklim ini biasanya menjadi ruang yang banyak dimanfaatkan oleh para calon legislatif dari berbagai partai politik untuk meraih suara para anggota majelis taklim. Banyak partai politik yang secara khusus mengadakan silaturahmi kepada pimpinan majelis taklim untuk dapat meraih simpati masanya. Atau, ada pula partai politik yang secara khusus membangun wadah majelis taklim ini untuk lebih mudah mengorganisir masanya dan memberikan doktrin politik serta kepentingannya.<sup>32</sup> Pada masa Orde Baru, Golongan Karya (GOLKAR) misalnya, sebuah partai politik pemerintah yang dominan pada masa orde baru menggunakan majelis taklim sebagai salah satu mesin politiknya dengan membentuk kelompok-kelompok pengajian yang bernama Al-Hidayah di samping organisasi dakwah bernama Majelis Dakwah Islamiyah yang seringkali disingkat dengan MDI.<sup>33</sup> Secara kelembagaan MDI ini tumbuh dan dibuat hingga ke akar rumput. Saat ini keberadaan majelis taklim seperti Al-Hidayah di daerah tidak lagi dapat dilihat sebagai *underbow* partai Golkar.<sup>34</sup>

Susilo Bambang Yudoyono (SBY) presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 inipun berinisiatif untuk mendirikan Majelis Dzikir SBY bernama

---

<sup>32</sup> lihat <http://nasional.kompas.com/read/2009/>, "18 Juta Anggota Majelis taklim se-Indonesia Dukung JKWin". Diakses pada tanggal, 22 April 2017.

<sup>33</sup> Sekedar sebagai keterangan tambahan, keberadaan pengajian Al Hidayah maupun MDI, masih diperhitungkan untuk menjalankan mekanisme politik di internal tubul Golkar. Sebagai contoh Sementara, konvensi DPD provinsi diselenggarakan antara 7 September sampai 15 Oktober 2003. Di sini bakal calon disaring lagi melalui voting tertutup dengan hak suara DPD provinsi 3 suara (*voting block*), DPD kabupaten/kota masing-masing 1 suara, DPD AMPG, KPPG, Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPI, HWK, Al-Hidayah, MDI dan Satkar Ulama masing-masing 1 suara. Lima besar bakal calon disampaikan ke tingkat nasional. Keterangan ini dapat dibaca lebih lanjut pada situs <http://www.tokohindonesia.com/majalah/04/berita.shtml>.

<sup>34</sup> Lihat laporan *inseption phase* yang dibuat oleh AD Kusumaningtyas pada tulisannya berjudul *Inisiatif-inisiatif untuk Pemberdayaan Perempuan Melalui Ranah Pendidikan Transformatif Keislaman di Kabupaten Cianjur*.

'Nurulsalam' atau "cahaya keselamatan". Majelis yang didirikan SBY sejak Pemilu Presiden 2004 belakangan dikelola oleh sebuah yayasan tersendiri. Saat ini Majelis ini telah memiliki cabang di hampir seluruh provinsi, sejumlah kerabat dan kolega SBY duduk sebagai pengurus yayasan, sementara penyokong dananya adalah sejumlah pengusaha yang dekat dengan pemimpin Negara ini.

Melihat fungsi dan peran majelis taklim, maka sebenarnya tidak sulit untuk mengidentifikasi atau bahkan mendirikan majelis taklim tersebut, jika sudah mempunyai; 1) badan yang mengurus kegiatan pendidikan secara berkesinambungan, 2) seorang ustadz atau kyai yang memberikan pelajaran secara rutin dan berkesinambungan, 3) peserta atau jamaah dalam relative banyak yang secara terus menerus mengikuti pelajaran, 4) kurikulum baik dalam bentuk buku atau kitab, pedoman atau rencana pembelajaran yang terarah, 5) kegiatan secara teratur dan berkala, dan 6) tempat tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

#### **D. TAHAPAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI MAJELIS TAKLIM DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

Seperti yang sudah dijelaskan dibagian pertama, pengembangan masyarakat lokal ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai system klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Adapun tahapan intervensi komunitas yang digunakan adalah sebagaimana tahapan intervensi pekerjaan sosial pada umumnya yang meliputi *studi pendahuluan tentang gambaran majelis taklim, identifikasi masalah dan potensi majelis taklim, penyusunan alternative rencana aksi, penataan dan pelaksanaan program aksi, dan evaluasi*, sebagaimana akan diulas satu persatu berikut ini:

### **1) Gambaran Majelis Taklim di Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Keseharian masyarakat di Kelurahan Mijen sangat dekat dengan kehidupan keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan seperti majelis ta'kim dan TPQ. Majelis taklim yang ada di kelurahan tersebut mencapai 50 buah. Jika dihitung dengan kelompok shalawatan yang biasa diadakan di rumah-rumah tokoh agama di setiap RT-nya maka jumlah ini bisa bertambah.

Majelis taklim di kelurahan Mijen terbagi dalam dua kategori: Majelis taklim laki-laki dan majelis taklim perempuan. Berbeda dengan majelis taklim yang berkembang secara umum, majelis taklim laki-laki dan perempuan terpisah secara struktur organisasi maupun pengajaran. Majelis taklim yang semula dapat dipergunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari agama lambat-laun mengalami perubahan dengan adanya pemisahan antara majelis taklim laki-laki dan majelis taklim perempuan. Pemisahan tersebut, membawa konsekuensi yang mendasar: adanya perbedaan pada pengajar dan tema yang diajarkan. Untuk perempuan, tema yang diajarkan pada umumnya tentang beribadah dan kewajiban seorang isteri terhadap suami dan konsekuensi isteri jika melanggar atau menjalankan kewajibannya (konsep pahala dan dosa bagi isteri). Sementara, tema untuk Majelis taklim laki-laki adalah kewajiban dan peran laki-laki sebagai imam dan pencari nafkah keluarga. Meskipun demikian, baik majelis taklim laki-laki maupun majelis taklim perempuan pada dasarnya berbagi kesamaan yang khusus: keduanya bertujuan untuk mengajarkan sekaligus menyebarluaskan ajaran agama Islam di masyarakat.

Majelis taklim yang ada di Kelurahan Mijen yang paling aktif adalah para perempuan ini bisa mengikuti 4-5 hari dalam seminggu dan menjadi anggota dari beberapa majelis taklim sekaligus. Berbeda dengan laki-laki yang hanya satu kali dalam seminggu. Majelis taklim yang beranggotakan perempuan biasanya berbasis di Madrasah, sementara laki-laki berbasis di Masjid. Hal ini karena ada anggapan bahwa perempuan tidak leluasa masuk mesjid diakibatkan adanya periode menstruasi dimana ada anggapan bahwa

perempuan haid tidak boleh masuk mesjid. Mesjid masih diidentikkan dengan tempat untuk laki-laki.

Di Kelurahan Mijen ditemukan bahwa majelis taklim ini merupakan ruang yang sangat strategis bagi perempuan untuk dapat mengakses wilayah publik. Ruang ini dapat membuat perempuan keluar dari kehidupan rutin dan kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Melalui majelis taklim ini para perempuan dapat bersosialisasi dan bergaul dengan perempuan lain di luar rumah. Majelis taklim menjadi ruang yang aman bagi perempuan dipengaruhi pula oleh konteks sosial dan budaya di Kelurahan Mijen dimana ada pemahaman jender yang membakukan peran laki-laki dan perempuan dan intepretasi agama dan sistem budaya yang melegitimasi hal tersebut.

Pemahaman tentang peran perempuan di wilayah domestik dan lelaki di wilayah publik masih sangat kental di kalangan masyarakat perumahan Krapyak. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian narasumber di Kelurahan Mijen mengungkapkan bahwa laki-laki yang menguasai wilayah publik dan perempuan bekerja pada wilayah domestik. Sistem ini telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan diterima sebagai peran yang natural. Ini berimbas pada rendahnya perempuan mendapatkan akses ke wilayah publik untuk mengaktualisasikan dirinya. Walaupun sebagian besar menganggap hal ini alamiah, salah seorang narasumber sempat menanyakan apakah peran ini merupakan sesuatu yang mutlak sebagai tugas perempuan. Aturan mutlak tentang laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai yang dipimpin dipegang kuat. Salah seorang narasumber perempuan yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya mengatakan bahwa walaupun ia memiliki penghasilan yang lebih dan aktifitas yang banyak, namun ia tetap menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Pemahaman itu disandarkan pada Surat An-Nisa : 34 *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, disebabkan Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan juga karena kaum laki-laki telah menafkakan sebagian dari harta mereka"*. Pengertian ini yang sering disampaikan kepada para anggota majelis taklim di perumahan tersebut tersebut.

## 2) Identifikasi Masalah dan Potensi Majelis Taklim

Berdasarkan paparan majelis taklim di Kelurahan Mijen Kota Semarang, tergambar pula permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh majelis taklim tersebut. Adapun masalah di suptar pengajaran dan materi pengajian adalah yang diajarkan disetiap pertemuan majelis taklim baru sebatas pelajaran membaca al-Qur'an dengan tajwidnya, terjemahan ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca, fiqih ibadah, hadist, nasehat-nasehat agama yang diambil dari kisah-kisah teladan para nabi dan orang-orang saleh, dan do'a-do'a dalam kondisi dan situasi tertentu. Belum ada materi pengajian dengan tema-tema kekinian dan yang bersifat kesadaran sosial dalam konteks ajaran agama Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan atau hadist, padahal materi tersebut sangat diperlukan.

Sedangkan potensi yang dimiliki oleh majelis taklim sebagai institusi pengembangan masyarakat lokal adalah:

1. Majelis taklim ini sudah secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menyangkut kesejahteraan anak-anak dan wanita rawan sosial-ekonomi (janda) dalam kegiatan santunan uang dan bantuan materi setiap tahunnya. Maka paling tidak terbuka suatu kemungkinan untuk menjalankan program kesejahteraan sosial yang dapat menjawab masalah sosial terkini dan dapat menyentuh warga seluas-luasnya.
2. Majelis taklim sudah terbiasa menghidupi dirinya sendiri dengan dana yang dikumpulkan dari jama'ahnya untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan.

Dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki majelis taklim tersebut, maka program aksi yang dipilih adalah menguatkan misi sosial majelis taklim yang telah ada dengan memberikan pendidikan kesejahteraan sosial dalam arti memberikan wawasan tentang kesejahteraan sosial kepada pengurus majelis taklim sebagai target antara dari masalah sosial yang dialami kelompok target, yaitu anak-anak dan wanita rawan sosial-ekonomi (janda), lansia dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

## 3) Penyusunan Alternatif Rencana Aksi

Penyusunan rencana aksi ini dilakukan bersama-sama dengan kader masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seorang ahli perencanaan sosial.

Rencana aksi berupa draft program yang akan dijalankan sebagai hasil dari diadakannya identifikasi masalah dan potensi. Rekomendasi dari penyusunan yang dilakukan bersama-sama adalah perlu menentukan pilihan apakah rencana aksi yang akan disusun berdasarkan potensi atau masalah sosial yang ada, dan perlunya dilakukan *assessment* lanjutan tentang masalah sosial tersebut. Sedangkan mengenai pendidikan kesejahteraan sosial, sebelum diputuskan materi yang akan diberikan maka perlu ditelaah terlebih dahulu kurikulum dan materi pelajaran yang selama ini diberikan oleh para ustadz atau ustadzah di majelis taklim.

Selain perlu memasukkan materi pendidikan kesejahteraan sosial pada kurikulum majelis taklim, sebaiknya para pengurus majelis taklim perlu diberi ketrampilan *fundraising* (penggalan dana) untuk membantu kelancaran dan kesinambungan program aksi, namun sebelumnya, perlu diidentifikasi sumber-sumber dana yang dijadikan sandaran setiap majelis taklim.

#### **4) Penataan dan Pelaksanaan Program Aksi**

##### **a. Pengembangan Kurikulum, Kapasitas Mengajar dan Pengurus Majelis Taklim**

Pengembangan kurikulum, kapasitas mengajar dan pengembangan majelis taklim yang dibidik adalah bagaimana meningkatkan kualitas isi materi pengajian serta bagaimana materi itu menyentuh isu-isu kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas metode penyampaian yang berkaitan dengan ketrampilan individual dan bagaimana memperkaya referensi yang digunakan.

Sebelumnya akan dijelaskan disini apa yang dimaksud dengan kurikulum majelis taklim itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum disini tentu saja bukanlah kurikulum formal sebagaimana lazimnya terdapat dalam dunia pendidikan formal, namun yang dimaksud dengan kurikulum adalah materi pengajian dan cara penyampaiannya.

Adapun kurikulum atau materi pengajian yang ada di majelis taklim perum Krapyak kota Semarang adalah sebagai berikut:

No	Materi	Keterangan	
1	Fiqih		
	Fiqhul Ibadah	<i>Ibadah mahdzah</i> ; ibadah yang diletakkan pada hubungan dengan Tuhan	<i>Ibadah ghair mahdzah</i> ; ibadah yang diletakkan pada hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia lainnya.
	Fiqhul Munakahah (Pernikahan)	Dibahas kepada laki-laki dan perempuan dengan tekanan: Laki-laki adalah tanggung jawab sebagai kepala keluarga, laki-laki imam untuk anak dan isterinya Perempuan ta'at kepada suami, tidak menjadi perempuan yang nusyuz (membangkang) suami agar menjadi isteri yang sholehah.	Dibahas kepada laki-laki dan perempuan, namun ada tekanan yang berubah. Pada awalnya ada perbedaan penekanan antara laki-laki dan perempuan, sekarang sama. Penyampaian materi ini ditekankan agar bagaimana suami-istri bisa bekerjasama dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.
	Fiqh Muamalah termasuk didalamnya pembahasan tentang harta dan ijab qabul (jual beli)	hanya dibahas pada jamaah laki-laki	dibahas pada jamaah laki-laki dan perempuan dengan asumsi, perempuan perlu mengetahui Fiqh Muamalah agar pengetahuan itu dapat digunakan oleh perempuan dalam yang realitasnya sudah terlibat dalam bidang ekonomi.
	Sumber Rujukan	Kitab Madzhibul Arba'ah (empat mazhab ulama Fiqh), Kitab I'anatutthalibin, Kitab Fathul Mu'in	Kitab Madzhibul Arba'ah (empat mazhab ulama Fiqh), Kitab I'anatutthalibin, Kitab Fathul Mu'in Fiqh perempuan, buku-buku Umum
2	Akhlak		
	Akhlak Mahmudah (Akhlak	Pemaparannya lebih menekankan kepada perempuan	Pemaparannya lebih menyeluruh, tidak hanya perempuan saja yang harus

	baik/Terpuji)	yang shalehah	shalihah, tapi laki-laki pun harus Shalih (Ada Keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan
	Akhlak Madzmumah (Akhlak Buruk/Tidak terpuji)	Perempuan durhaka, Nusyudz dan balasan bagi perempuan durhaka dan Nusyudz	Konsep durhaka tidak saja pada isteri tapi pada suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan (isteri) dan tidak menafkahi isteri
	Rujukan	Kitab Sullamuttaufiq	Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Kitab Ihya Ulum al-Din Al-Ghazali

#### b. Pengembangan Program Sosial Majelis Taklim

Pengembangan program sosial majelis taklim, yang dibidik adalah bagaimana mengembangkan program sosial yang telah dijalankan majelis taklim dengan memberikan konteks kesejahteraan sosial di dalamnya. Upaya penyadaran merupakan tujuan yang paling penting. Dalam hal ini bahwa majelis taklim, para pengajar dan pengurus mempunyai peran dan fungsi sebagai pemberdaya dan pengembang masyarakat guna menciptakan kesejahteraan sosial, dalam skala apapun. Pemberi wawasan kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam yang dilakukan sebelumnya juga dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan program sosial tersebut. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan dan diskusi, meliputi; a) tentang program pendidikan dan perlindungan anak berbasis majelis taklim, b) majelis taklim dan pelayanan terhadap orang-orang lemah (dhuafa)
- 2) Penjaminan program sosial berbasis majelis taklim, meliputi; a) program anak asuh majelis taklim dan pendampingan tertib administrasi program anak asuh, b) pendirian pos sehat untuk kaum dhuafa berbasis majelis taklim bersinegi dengan kader posyandu dan kader usaha ekonomi produktif

#### 5) Evaluasi

Setidaknya ada empat pertanyaan yang dapat diajukan dalam evaluasi program, yaitu:

1. Apakah rencana sudah dilaksanakan ?
2. Apakah tujuan sudah tercapai ?
3. Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efektif ?
4. Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efisien ?

Evaluasi ini akan diuraikan proses evaluasi yang dilakukan, namun secara ringkas akan diuraikan hasil yang merupakan sementara, artinya bukan tujuan akhir mutlak atau *ultimate goal*, namun lebih merupakan tujuan proses, sebagaimana tujuan khas dalam model pemberdayaan masyarakat lokal (*locality development*).

## E. KESIMPULAN

Pengembangan masyarakat lokal berbasis majelis taklim memberikan penekanan pada tujuan yang berorientasi pada proses (*process goal*) dimana masyarakat yang dalam hal ini adalah para pengurus dan pengajar majelis taklim dicoba untuk diintegrasikan serta dikembangkan kapasitasnya dalam upaya mencegah masalah mereka sendiri (permasalahan internal di majelis taklim) serta masalah di masyarakat, secara komparatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan untuk melakukan pengembangan masyarakat lokal berbasis pada majelis taklim melalui beberapa tahapan, yaitu; studi pendahuluan tentang gambaran majelis taklim, identifikasi masalah dan potensi majelis taklim, penyusunan alternative rencana aksi, penataan dan pelaksanaan program aksi, dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muzayyin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Ed. Revisi., Cet. ; Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Dyawati Fuaida, Lisma, *Pengamalan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008).
- Halim, Rr. Suhartini A., dkk., *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: LkiS, 2005).
- <http://nasional.kompas.com/read/2009/>, "18 Juta Anggota Majelis taklim se-Indonesia Dukung JKWin". Diakses pada tanggal, 22 April 2017.
- <http://penamasdramaga.blogspot.com/2010/09/majlis-taklim-24.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- <http://showbizdunia.blogspot.com/2011/10/sejarah-asal-usul-namamajlis-talim.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- <http://uchinfamiliar.blogspot.com/2009/02/macam-macam-majelis-taklim.html>, diunduh pada tanggal, 22 April 2017.
- <http://www.tokohindonesia.com/majalah/04/berita.shtml>.
- Hukmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2001).
- Ife, Jim, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*, (Melbourne: Addison Wesley Longman, 1997).
- Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta "Pola Pembinaan Majelis Taklim di DKI Jakarta, (Jakrta: Pemerintah DKI Jakarta, 1986).
- Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta "Pola Pembinaan Majelis Taklim di DKI Jakarta, (Jakrta: Pemerintah DKI Jakarta, 1990).
- Laporan *Inseption phase* yang dibuat oleh AD Kusumaningtyas pada tulisannya berjudul *Inisiatif -inisiatif untuk Pemberdayaan Perempuan Melalui Ranah Pendidikan Transformatif Keislaman di Kabupaten Cianjur*.
- Laporan WEMC RAHIMA *Strategi Perempuan dan Peran Majelis taklim dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di Desa Mulyasari Kabupaten Cianjur* belum dipublikasikan, 2007.
- MK, Muhsin, *Manajemen Majelis Taklim*, (Jakarta : Pustaka Internusa, 2009).
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996).
- Soelaiman, M. Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995).

- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Syahrudin, Nurleni, <http://nurlenisyah.blogspot.com/2010/05/majelistaklim-sebagai-lembaga.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*, (Jakarta : Kecana Prenada Media Group, 2013).